



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, memelihara fakir miskin, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel, perlu pengelolaan data penduduk miskin di Kabupaten Donggala;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN.

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
2. Penduduk adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Penduduk Miskin adalah kondisi sosial ekonomi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih, pekerjaan dan hak berpartisipasi sosial.
4. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
6. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

7. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis dan sosial.
9. Ketunaan sosial adalah seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melakukan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum.
10. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Tindak kekerasan adalah tindakan fisik atau psikologi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.
12. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
13. Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Anak dengan Kedisabilitasan yang selanjutnya disingkat ADK adalah Anak dengan Kedisabilitasan di Wilayah Kabupaten Donggala.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
17. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*.
18. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
19. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang dengan HIV/AIDS di Wilayah Kabupaten Donggala.

20. IOP satu data adalah *platform data warehouse* dan *dashboard* pimpinan untuk menunjang pengambilan Keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
22. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
24. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
25. Bupati adalah Bupati Donggala.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Donggala.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
28. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Donggala.
29. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala.
30. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Donggala.
31. Kelurahan atau Desa adalah Kelurahan atau Desa di wilayah Kabupaten Donggala.
32. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Donggala.
33. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Donggala.

BAB II

PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan Penduduk Miskin.
- (2) Pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pendataan Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan Laporan Data Penduduk Miskin dan selanjutnya dientrikan ke dalam *Database* Penduduk Miskin Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Penduduk Miskin

Pasal 3

- (1) Penetapan kriteria Penduduk Miskin dilakukan dengan penilaian berdasarkan indikator terdiri atas :
- a. status kepemilikan Rumah;
 - b. dinding rumah terluas;
 - c. luas lantai bangunan;
 - d. lantai terluas;
 - e. fasilitas buang air besar;
 - f. sumber air minum;
 - g. sumber penerangan;
 - h. bahan bakar utama;
 - i. pendidikan kepala rumah tangga;
 - j. pekerjaan utama kepala rumah tangga;
 - k. penghasilan kepala rumah tangga;
 - l. jumlah anggota rumah tangga;
 - m. jumlah keluarga dalam Rumah Tangga;
 - n. jumlah anggota rumah tangga yang bekerja;
 - o. jumlah anggota keluarga masih sekolah;
 - p. anggota keluarga penyandang Disabilitas;
 - q. anggota keluarga yang masuk kategori lanjut usia;
 - r. anggota keluarga yang menderita penyakit kronis;
 - s. akses terhadap pelayanan kesehatan;
 - t. nilai aset yang dimiliki yang mudah dijual; dan
 - u. pengeluaran untuk pakaian dalam setahun.
- (2) Rincian pedoman penilaian kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kategori Penduduk Miskin dapat ditetapkan berdasarkan jenis :
- a. Anak Balita terlantar;
 - b. Anak terlantar;
 - c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - d. Anak Jalanan;
 - e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - f. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah;

- g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. Lanjut Usia Telantar;
 - i. Penyandang Disabilitas;
 - j. Tuna Susila;
 - k. Gelandangan;
 - l. Pengemis;
 - m. Pemulung;
 - n. Kelompok Minoritas;
 - o. Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
 - p. ODHA;
 - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 - r. Korban *Trafficking*;
 - s. Korban Tindak Kekerasan;
 - t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial;
 - u. Korban Bencana Alam;
 - v. Korban Bencana Sosial;
 - w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; dan
 - x. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.
- (2) Definisi kategori dan jenis Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME, PENILAIAN DAN PENETAPAN

KATEGORI PENDUDUK MISKIN

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 5

- (1) Mekanisme penetapan kategori Penduduk Miskin dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kelurahan dan tingkat Daerah.
- (2) Data Penduduk Miskin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen kependudukan yang terdiri atas :
- a. nomor Kartu Keluarga;
 - b. NIK; atau
 - c. dokumen kependudukan lainnya yang diakui, berupa Kartu Identitas Anak (KIA), surat keterangan domisili.

- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan jika terjadi perubahan data Penduduk Miskin.
- (4) Perubahan Data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan pada setiap jenjang pelaksana musyawarah.
- (5) Kepala Dinas Sosial menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan terkait kriteria dan mekanisme penetapan Penduduk Miskin Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 6

- (1) Sebelum penetapan kategori Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan melakukan penilaian kategori Penduduk Miskin yang didasarkan pada kriteria dan jenis Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Hasil penilaian Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam daftar nominatif kategori Penduduk Miskin.
- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib mengumumkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman/informasi dan/atau *website* jika tersedia.
- (4) Data nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan musyawarah Desa dan Kelurahan untuk menetapkan kategori Penduduk Miskin.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, pengurus rukun warga, pengurus rukun tetangga, dan unsur pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah Desa dan Kelurahan dengan melampirkan berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Camat mengirimkan surat laporan hasil musyawarah seluruh Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (6) Format berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan data Penduduk Miskin hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di verifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Sosial selaku Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris;
 - c. Anggota terdiri atas :
 1. Dinas Sosial;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Camat; dan
 9. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 9 terdiri dari :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga sosial masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Badan Pusat Statistik; serta
 - d. forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dunia usaha yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Kepala Dinas Sosial atas nama ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan data hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi data, Bupati menetapkan data Penduduk Miskin di Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial mengirimkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penduduk Miskin kepada Kepala Desa dan Lurah melalui Camat.
- (2) Kepala Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa, dan Lurah wajib mengumumkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penduduk Miskin pada papan pengumuman/informasi dan *website* jika tersedia.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA
PENDUDUK MISKIN

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data Penduduk Miskin setiap bulan April dan September untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelolaan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan perubahan data Penduduk Miskin hasil muyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (3) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi yang diintegrasikan dengan IOP Satu Data Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tentang Penetapan Penduduk Miskin dijadikan sumber basis data kemiskinan di Daerah.
- (2) Penduduk Miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas Sosial melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pendataan, penetapan dan pemanfaatan data Penduduk Miskin di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan upaya penyelesaiannya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
PENDUDUK MISKIN

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA PENDUDUK MISKIN

No.	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	2	3	4	5	6
1	Status kepemilikan Rumah	Milik orang lain tanpa sewa	Milik orang tua	Menyewa	Milik sendiri
2	Dinding rumah terluas	berdinding bambu atau kayu berkualitas rendah/ bukan kayu jati	Tembok tanpa diples ter	Papan/kayu jati	Tembok kualitas baik
3	Luas lantai bangunan	≤5m2/jiwa	6m2/jiwa	7m2/jiwa	≥8m2/jiwa
4	Lantai terluas	Tanah	Plester semen atau batu bata	Tegel	Keramik
5	Fasilitas BAB	Tidak punya	Umum	Jamban bersama	Milik sendiri
6	Sumber air minum	Sungai / Air hujan	Sumur / mata air	Ledeng eceran	PDAM / membeli air kemasan
7	Sumber penerangan	Petromak/ub lik	Listrik numpang	PLN 450 Watt	PLN 900 Watt
8	Bahan bakar utama	Kayu bakar	Arang	Gas LPG 3 kg	Gas elpiji ≥3 kg atau Blue gas
9	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ tidak tamat SD	Tamat SD/SMP	Tamat SMA	Tamat Perguruan Tinggi
10	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	Tidak Punya Pekerjaan	Pekerja Bebas	Buruh/Kary awan	Wira usaha / Pedagang besar
11	Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)	<Rp 608.828	>Rp 608.828 s.d. Rp 1.500.000	>Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.500.000	>Rp 2.500.000
12	Jumlah Anggota Rumah Tangga	≥ 6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara	5 orang	4 orang	1 – 3 orang
13	Jumlah KK dalam Rumah Tangga	> 3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
14	Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja	0 Orang	1 Orang	2 Orang	> 3 Orang

No.	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	2	3	4	5	6
15	Jumlah anggota keluarga masih sekolah	> 3 Orang	2-3 Orang	1 Orang	0 Orang
16	Anggota keluarga penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas multi	Penyandang Disabilitas ganda	Penyandang Disabilitas tunggal	Tidak ada
17	Anggota keluarga yang masuk kategori lanjut usia	Lanjut usia terlantar	Lanjut usia tidak potensial	Lanjut usia potensial	Tidak ada
18	Anggota keluarga yang menderita penyakit kronis	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis berat	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis sedang	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis ringan	Tidak ada
19	Akses terhadap pelayanan kesehatan	Tidak memiliki jaminan kesehatan	Memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif	Memiliki jaminan kesehatan namun ada tunggakan pembayaran iuran	Memiliki jaminan kesehatan aktif
20	Nilai Aset yang dimiliki yang mudah dijual	Rp 0 s.d. Rp 608.828	Rp 608.828 s.d. Rp 1.500.000	Rp 1.500.000 s.d. Rp 5.000.000	>Rp 5.000.000
21	Pengeluaran untuk pakaian dalam setahun	Tidak ada	1 stel untuk setiap anggota keluarga	2 stel untuk setiap anggota keluarga	>2 stel untuk setiap anggota keluarga

Penentuan Kriteria penduduk miskin sebagai berikut :

No.	Skor	Kategori
1	2	3
1	Total Nilai 0 sampai dengan 50	Sangat miskin
2	Total Nilai >50 sampai dengan 60	Miskin
3	Total Nilai >60 sampai dengan 70	Rentan miskin
4	Total Nilai lebih dari 70	Tidak miskin

Penduduk yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam Data Base Penduduk Miskin adalah yang memiliki skor (total nilai) maksimal 60 (enam puluh).

Keterangan :

- 1. Status Kepemilikan Rumah
 - a. Milik Orang Lain Tanpa Sewa

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik family/bukan family) dengan tidak membayar sewa.

b. Milik Orang Tua

Status rumah tersebut adalah milik orang tua.

c. Menyewa

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik family/bukan family) dengan membayar sewa.

d. Milik Sendiri

Status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga.

2. Dinding rumah terluas

adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

a. Bambu/Kayu berkualitas rendah

Dinding terbuat dari bambu/anyaman bambu (gedek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati).

b. Tembok tanpa diplester

Dinding terbuat dari batu bata yang dicampur/direkatkan dengan tanah liat atau direkatkan dengan semen tanpa diplester.

c. Papan/Kayu Jati

Dinding terbuat dari papan/kayu jati.

d. Tembok Kualitas Baik

Dinding terbuat dari tembok/plesteran dan dalam kondisi baik.

3. Luas Lantai Bangunan

Jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa/anggota rumah tangga tersebut.

Bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. Tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati.

a. $< 5 \text{ m}^2/\text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $< 5 \text{ m}^2$. (1 (satu) jiwa menempati luas kurang dari 5 m^2).

b. $6 \text{ m}^2/\text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $= 6 \text{ m}^2$. (1 (satu) jiwa menempati luas 6 m^2).

c. $7 \text{ m}^2/\text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $= 7 \text{ m}^2$. (1 (satu) jiwa menempati luas 7 m^2).

d. $> 8 \text{ m}^2/\text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut $> 8 \text{ m}^2$. (1 (satu) jiwa menempati luas lebih dari 8 m^2).

4. Lantai Terluas

adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang

luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi.

a. Tanah

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

b. Plester Semen/Batu Bata

Plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu bata merah.

c. Tegel

Ubin yang terbuat dari semen/aci.

d. Keramik

Lantai yang tersusun dari keramik.

5. Fasilitas BAB

Ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga.

a. Tidak Punya

Apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya di lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.

b. Umum

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. Misalnya MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.

c. Jamban Bersama

Apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.

d. Milik Sendiri

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

6. Sumber Air Minum

a. Sungai/Air Hujan

Air yang berasal dari sungai/hujan

b. Sumur/Mata Air

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air).

c. Ledeng Eceran

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air Perumda Giri Tirta) dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan/bukan secara berlangganan.

d. Perumda Giri Tirta / membeli air kemasan

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum, Perumda Giri Tirta, atau Badan Pengelola Air Minum, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

7. Sumber Penerangan
 - a. Petromak/ublik;
 - b. Listrik Numpang;
 - c. PLN 450 watt; dan
 - d. PLN 900 watt.

8. Bahan Bakar Utama

Energi utama yang digunakan di rumah untuk memasak. Apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.

 - a. Kayu Bakar;
 - b. Arang;
 - c. Gas LPG 3kg; dan
 - d. Gas LPG > 3 kg atau Blue gas.

9. Pendidikan Kepala Rumah Tangga
 - a. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD;
 - b. Tamat SD/SMP;
 - c. Tamat SMA/ sederajat; dan
 - d. Tamat Perguruan Tinggi.

10. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga
 - a. Tidak Punya Pekerjaan
 - b. Pekerja Bebas

Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Contoh :

Buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi/kelapa/cengkeh, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas, sopir lepas dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, tukang ojek, dan sebagainya.
 - c. Buruh/Karyawan

Buruh/karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
 - d. Wira Usaha/Pedagang Besar

Kepala Rumah Tangga yang bekerja atau berusaha (wira usaha), baik menggunakan buruh/karyawan yang dibayar (pegawai tetap) maupun buruh/karyawan yang tidak dibayar (pegawai tidak tetap).

11. Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)
 - a. < Rp608.828,00;
 - b. > Rp608.828,00 s.d Rp1.500.000,00;
 - c. > Rp1.500.000,00 s.d Rp2.500.000,00; dan
 - d. > Rp2.500.000,00.

12. Jumlah Anggota Rumah Tangga

- a. ≥ 6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara;
- b. 5 orang;
- c. 4 orang; dan
- d. 1 s/d 3 orang.

13. Jumlah KK dalam Rumah Tangga

- a. > 3 KK;
- b. 3 KK;
- c. 2 KK; dan
- d. 1 KK.

14. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

- a. 0 orang;
- b. 1 orang;
- c. 2 s/d 3 orang; dan
- d. > 3 orang.

15. Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah

- a. > 3 orang;
- b. 2 s/d 3 orang;
- c. 1 orang; dan
- d. 0 orang.

16. Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4 (empat) Ragam Penyandang Disabilitas yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, antara lain :
 - 1) Penyandang Disabilitas Multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas;
 - 2) Penyandang Disabilitas Ganda adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas; dan
 - 3) Penyandang Disabilitas Tunggal adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas.

17. Anggota Keluarga Kategori Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, dengan kategori yang terdiri atas;

a. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan/atau terlantar secara psikis dan sosial;

b. Lanjut Usia Tidak Potensial

Lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring di tempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas; dan

c. Lanjut Usia Potensial

Lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. Beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.

18. Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis

Penyakit kronis adalah suatu kondisi kesehatan yang berlangsung lama dan biasanya tidak sepenuhnya dapat disembuhkan. Penyakit ini mempengaruhi fungsi tubuh secara berkelanjutan dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ada yang diderita seumur hidup.

a. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat meliputi :

- 1) Jantung (Decomp/Gagal Jantung);
- 2) Diabetes Melitus Tipe 2 + Komplikasi;
- 3) Gagal Ginjal (Cuci Darah);
- 4) Kanker Stadium IV (Metastase); dan
- 5) Stroke Berat.

b. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang meliputi :

- 1) Asma;
- 2) Jantung;
- 3) Diabetes Melitus Tipe 1 (Terkontrol);
- 4) Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK/Paru); dan
- 5) HIV/AIDS.

c. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan meliputi :

- 1) Pneumonia;
- 2) TBC;
- 3) Stroke Ringan;
- 4) Hipertensi; dan
- 5) ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).

19. Akses terhadap layanan Kesehatan

Akses pelayanan kesehatan adalah kemampuan setiap individu untuk mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Akses pelayanan kesehatan medis dapat diukur dalam ketersediaan sumber daya dan jumlah orang yang memiliki asuransi untuk membayar penggunaan sumber daya. Adapun akses pelayanan kesehatan meliputi :

- a. memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif artinya berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut sudah tidak berlaku;
- b. memiliki jaminan kesehatan aktif namun ada tunggakan pembayaran iuran berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut masih berlaku namun terdapat kendala tunggakan pembayaran iuran; dan
- c. memiliki jaminan kesehatan aktif berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut masih berlaku dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

20. Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual

Nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti : lemari es/kulkas, televisi, penyejuk ruangan/AC, pemanas air/*waterheater*, telepon rumah, HP, emas/perhiasan dan tabungan, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya), dengan nilai asset sebagai berikut :

- a. Rp. 0,00 - s.d Rp. 608.828,00;
- b. Rp. 608.828,00 s.d Rp. 1.500.000,00;
- c. Rp. 1.500.000,00- s.d Rp. 5.000.000,00; dan
- d. > Rp5.000.000,00.

21. Pengeluaran pakaian dalam setahun terakhir

Adalah pengeluaran yang dihabiskan untuk membeli pakaian oleh keluarga dalam periode setahun terakhir.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
PENDUDUK MISKIN

DEFINISI KATEGORI DAN JENIS PENDUDUK MISKIN

Jenis-Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriteria :

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka;
- b. Didakwa; dan
- c. Dijatuhi Pidana.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat umum; dan

- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK).

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan

b. terlantar secara psikis dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan

- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami tindakan eksploitasi;
- c. mengalami penelantaran; dan
- d. mengalami perlakuan diskriminasi dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin; dan
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran/deportasi, mengalami *trafficking*, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

- a. korban jiwa manusia;

- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikolog.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
PENDUDUK MISKIN

Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa /Kelurahan

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Yang Masuk Kategori Miskin Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Yang bertanda tangan di bawah ini kami Masyarakat Desa/Kelurahan..... Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun Telah melaksanakan musyawarah penetapan warga yang masuk Kategori miskin Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan menandatangani berita cara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif dengan menghasilkan Keputusan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk dalam kategori Penduduk Miskin berdasarkan hasil penilaian, sebanyak jiwa;
2. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Balita Terlantar, sebanyak jiwa;
3. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Terlantar, sebanyak jiwa;
4. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebanyak jiwa;
5. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Jalanan sebanyak jiwa;
6. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak jiwa;
7. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah sebanyak jiwa;
8. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak jiwa;
9. Jumlah Penduduk dalam jenis Lanjut Usia Telantar sebanyak jiwa;
10. Jumlah Penduduk dalam jenis Penyandang Disabilitas sebanyak jiwa;
11. Jumlah Penduduk dalam jenis Tuna Susila sebanyak jiwa;
12. Jumlah Penduduk dalam jenis Gelandangan sebanyak jiwa;
13. Jumlah Penduduk dalam jenis Pengemis sebanyak jiwa;
14. Jumlah Penduduk dalam jenis Pemulung sebanyak jiwa;
15. Jumlah Penduduk dalam jenis Kelompok Minoritas sebanyak jiwa;
16. Jumlah Penduduk dalam jenis Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak jiwa;
17. Jumlah Penduduk dalam jenis Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak jiwa;
18. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak jiwa;
19. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Trafficking sebanyak jiwa;
20. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Tindak Kekerasan sebanyak jiwa;
21. Jumlah Penduduk dalam jenis Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebanyak jiwa;
22. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Bencana Alam sebanyak jiwa;

23. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Bencana Sosial sebanyak jiwa;
24. Jumlah Penduduk dalam jenis Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak jiwa; dan
25. Jumlah Penduduk dalam jenis Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis sebanyak jiwa.

Selanjutnya terkait dengan Daftar Nama (*By name By Address*) warga Masyarakat yang masuk Kategori point 1 sampai dengan 25 tercantum dalam Lampiran Berita Acara Musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Donggala,

Yang Melaksanakan Musyawarah

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI